

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, S. H. (2022). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Budiharjo, Aswanto. (2001). *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Press
- Chatrine, D. R., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2013). *Korupsi & Strategi Nasional: Pencegahan Serta Pemberantasannya: Referensi*.
- H. Salim HS, & Nurbaini, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidz, A. J. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kusumah, M W. (2001). *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lopa, Baharudin. (1997). *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Marzuki, Mahmud Peter. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurdjana, IGM. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Prabowo, Ismail. (1998). *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*. Surabaya: Dharmawangsa Media Press
- Purwosusilo, H. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, Sajipto. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Santiago, Faisal. (2006). *Memerangi Korupsi*. Jakarta: Cintya Press

- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, E. (2014). *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa*. Diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.

Jurnal

- Anwar, C., & Hermansyah, A. (2020). *Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 4(4).
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS*. Law Reform, 14(1).
- Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Jurnal Ilmiah Simantek, 4(3).
- Santiago, F. (2014). *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*. Jurnal Lex Publica, Vol 1. No. 1
- Santiago, F. (2017). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Pagaruyuang Law Journal, 1(1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karya Ilmiah

- Agustina, R. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Garis Marka Jalan Yang Mrngakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)*.
- Dwiwanty, G. (2018). *Efektivitas Sistem E-Procurement Dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan*

- Ruang Provinsi Riau (Skripsi Fakultas Hukum Dan Syariah UIN SUSKA Riau).
- Filosofia, R. I. (2019). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Yang Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Korupsi Dalam Tahap Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Bidang Konstruksi Bangunan (Skripsi Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember).
- Harita, D. C. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Studi Putusan No: 116/Pid. Sus-TPK/2014/Pn. Mdn) (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area).
- Kadir, A. (2020). Kedudukan TP4D Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Parawangsyah, A. E. (2017). Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Purwaditya, A. R. (2022) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Ruko Di Kota Yogyakarta (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rivai S, M. (2016). (Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Nomor: 37/Pid.Sus/2011/PN. Mks) (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Rosyidin, M. F. (2022). Aspek Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN Tgl) (Thesis Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal).
- Sholawati, S. N. (2016). Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Syarat Mendapatkan Surat Izin Mengemudi Di Kota Tarakan (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Website

Andar Ristabet Herda dengan judul “Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah” yang diakses pada 27 Januari 2023 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>